

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**UPDATING SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

**Jalan Soekarno – Hatta No. 35 Telp. (031) 3095362
BANGKALAN – 69111
website : [http: www.bangkalankab.go.id](http://www.bangkalankab.go.id)**



KERANGKA ACUAN KERJA (Term Of Reference - TOR)

Paket Pekerjaan: Updating Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

I. Latar Belakang

Salah satu Action Plan yang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI tentang pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung transparansi anggaran, BAPENDA selain harus mengimplementasikan dan melakukan penyesuaian sistem informasi pendukung pembayaran Pajak Daerah Lainnya seperti SIMDA, e-BPHTB dan e-NPWP, BAPENDA juga harus mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik baik menggunakan elektronik banking, mobile banking, pembayaran menggunakan e-money, virtual account, QRIS dan lain-lain.

Diharapkan dengan beberapa sistem pembayaran tersebut, para wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam proses pembayaran, tidak perlu setor tunai ke teller bank, transparansi sistem pembayaran dan transaksi pembayaran akan lebih baik.

Perubahan kebijakan terkait Pendapatan Daerah sering dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu. Pada tahun 2023 terdapat dua peraturan penting terkait Pendapatan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat perubahan nomenklatur kode rekening pendapatan dan memuat tentang penyesuaian tarif dan transaksi khusus BPHTB. Merespon perubahan kebijakan ini, tentu Sistem Informasi yang berkaitan dengan Pendapatan daerah seperti SIMA, e-BPHTB dan e-NPWP harus dilakukan penyesuaian.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan Updating Sistem Informasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 adalah:

1. Secara umum agar Sistem Informasi dapat di implementasikan dan dimanfaatkan secara efektif.
2. Sistem pembayaran Pajak Daerah lainnya bisa dibayarkan melalui Bank lainnya dan QRIS.
3. SIMDA sudah dilakukan penyesuaian nomenklatur Pendapatan yang baru.
4. Aplikasi e BPHTB sudah mengakomodir tarif baru

- NOPTK dan transaksi khusus.
5. Aplikasi e NPWPD sudah bisa cetak billing menggunakan sistem pembayaran Virtual Account dan QRIS
3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan Updating Sistem Informasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 adalah Sistem Informasi Pendapatan Daerah dapat di implementasikan dan dimanfaatkan secara efektif.
 4. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bangkalan.
 5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA BAPENDA Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024.
 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Nama Pengguna Anggaran: Dra. R. AMINA RACHMAWATI, M.Si.
Satuan Kerja: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

Data Penunjang¹

-
7. Standar Teknis Updating Sistem Informasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 diharapkan memenuhi standar teknis sebagai berikut :
 1. Pengembangan Aplikasi menggunakan Framework Code Igniter sesuai dengan aplikasi yang ada.
 2. Integrasi dengan sistem lain menggunakan web service Application Programming Interface (API)
 3. Teknologi API yang digunakan adalah RESTFull API
 4. Format data teks yang digunakan adalah JSON (Javascript Object Notation).
 8. Studi-Studi Terdahulu Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMDA) dan e-BPHTB sudah pernah dikembangkan berbasis web sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. SIMDA bisa diakses pada alamat url <http://simda.bangkalankab.go.id>. Aplikasi SIMDA disiapkan untuk terintegrasi dengan Aplikasi keuangan dan Bank.

e-BPHTB merupakan aplikasi yang mengelola data Biaya Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan di kabupaten Bangkalan. Ada perubahan kebijakan terkait tarif dan transaksi BPHTB sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga e-BPHTB harus dilakukan penyesuaian.

¹ Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

e-NPWP merupakan aplikasi pendukung yang mengelola registrasi wajib pajak daerah, e-NPWP juga dilengkapi fitur untuk membuat billing pembayaran pajak daerah lainnya.

9. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

10. Metode pemilihan Penyedia, Jenis Kontrak, Kualifikasi Penyedia (Badan Usaha)

1. Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
2. Jenis Kontrak : berdasarkan :
 - o Cara Pembayaran : Lumpsum
 - o Pembebanan tahun Anggaran : Tahun Tunggal
 - o Sumber Pendanaan : APBD
 - o Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
3. Kualifikasi Penyedia (Badan Usaha)
 - 1) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha :
 - NIB : Sub. Golongan : KBLI 62019 (Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya)
 - 2) Memiliki Status Valid Keterangan wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak (KSWP)
 - 3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor

- dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- 4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan
 - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan; dan
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Menyetujui Surat Pernyataan Peserta berisi :
 - a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
 - d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan Lingkup dari kegiatan ini adalah :
1. Pembuatan Web Service yang mendukung sistem pembayaran Pajak Daerah Lainnya menggunakan QRIS.
 2. Pembuatan Fitur Penyesuaian tarif baru NOPTK dan

	<p>transaksi khusus di aplikasi e NPWPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyesuaian pembayaran BPHTB tarif 0 rupiah. 4. Pembuatan fitur cetak billing pembayaran menggunakan Virtual Account dan QRIS di aplikasi e NPWPD. 5. Penyesuaian kode rekening pendapatan dengan nomenklatur yang baru. 6. Pemindahan Hosting aplikasi SIMDA dan API Integrator ke Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. 7. Pemindahan Hosting e-BPHTB dan e-NPWPD ke Pusdatin Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Keluaran ²	Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Sistem Informasi Pendapatan Daerah, e-NPWPD dan e-BPHTB dapat di implementasikan dan dimanfaatkan secara efektif.
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<p>Peralatan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke jaringan dan server Bapenda 2. Akses ke Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. 3. Akses ke Pusdatin Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4. Koneksi internet
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	Peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa konsultasi adalah semua perangkat yang mendukung dan dibutuhkan untuk implementasi sistem informasi, berupa komputer/laptop untuk tenaga ahli dan pendukung, alat komunikasi dan lain-lain.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>Lingkup kewenangan Penyedia Jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke server yang sudah terinstal sistem terdahulu 2. Melakukan perubahan, modifikasi, penyempurnaan skala kecil sesuai yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam tujuan KAK
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Updating Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

17. Personel

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Hari ³
Tenaga Ahli:		
Team Leader - System Analyst	Minmal S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi Pengalaman 3 tahun	60
Pemrogram Perangkat Lunak	Minmal S1 Teknik Informatika /Sistem Informasi Pengalaman 1 tahun	40
Pemelihara Sistem/System Administrator	Minmal S1 Teknik Informatika /Sistem Informasi Pengalaman 1 tahun	40
Administrator/Do kumentator	Minimal D3 Seua jurusan Pengalaman 1 tahun	30

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Minggu Ke -						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Persiapan							
2	Analisis Sistem							
3	Pengembangan Sistem							
4	Ujicoba							
5	Implementasi							
6	Dokumentasi							

Laporan

19. Laporan Bulanan

Laporan Awal (jika ada).

20. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan akhir penyelesaian pekerjaan disertai panduan penggunaan fitur-fitur baru atau perubahan fitur-fitur yang sudah ada, harus diserahkan selambat-lambatnya setelah pekerjaan selesai sebanyak 3 (tiga) buku laporan

Hal-Hal Lain

21. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:

1. Pendampingan bagi administrator dan operator

Bangkalan, 18 Maret 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Dra. R. AMINA RACHMAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670713 198809 2 001